

LAKIP

LAPORAN

**AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

KABUPATEN JAYAWIJAYA

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat-Nya nikmat kesehatan, pemikiran, dan kemampuan yang diberikan sehingga LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020 ini dapat disusun.

LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020 disusun sebagai salah satu kewajiban instansi dalam memberikan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai visi dan misi yang diemban kepada pimpinan dan masyarakat (*public*). Muatan LAKIP merupakan cerminan penilaian kinerja tahunan yang dicapai oleh Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, bahwa visi pembangunan daerah adalah “Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya” dan misi pembangunan daerah yang terdiri atas (1) Meningkatkan taraf hidup masyarakat; (2) Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal, dan hukum; (3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); (4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; (5) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing; dan (6) Meningkatkan pembangunan berbasis Kampung dan kawasan Kampung. Berdasarkan 6 (enam) misi tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya menjabarkan arahan RPJMD dengan mendukung beberapa misi, antara lain:

- a. Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Misi 3: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural secara Berkelanjutan.

Dengan Visi-misi tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya fokus pada:

1. Tujuan dari Misi 1 (kesatu) yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung, dengan sasaran:
 1. meningkatkan kesempatan kerja dan jiwa wirausaha masyarakat,
 2. meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur;
2. Tujuan dari Misi 3 (ketiga) yaitu mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, dengan sasaran:
 1. meningkatkan kualitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah,
 2. meningkatnya kualitas pelayanan publik.

LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya ini nantinya menjadi LAKIP dalam memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada masyarakat (*public*) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Kiranya berbagai kelemahan dalam pemberdayaan masyarakat kampung di Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2020 ini dapat dijadikan pijakan untuk penyempurnaan kinerja berikutnya. Oleh karena itu, berbagai saran dan kritik sangat kami harapkan demi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Wamena, - - 2021

Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Jayawijaya



LENENSYA MANUPUTTY, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIK 19620808 198303 2 032

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Gambaran Umum.....	1
B. Maksud dan Tujuan LAKIP Tahun 2020.....	5
C. Sistematika LAKIP Tahun 2020.....	6
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	7
A. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayawijaya.....	8
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN JAYAWIJAYA.....	18
A. Pengukuran Kinerja.....	18
B. Capaian dan Analisa Kinerja.....	18
BAB IV HAMBATAN DAN UPAYA PEMECAHAN.....	26
BAB V PENUTUP.....	27

DAFTAR TABEL

1. Capaian Kinerja Sasaran DPMK	10
2. Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	19
3. Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Anggaran	24

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi DPMK Kabupaten Jayawijaya	2
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Strategis Tahun 2018-2023	28
2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020.....	30

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Governance) sebagaimana diamanatkan dalam ketetapan MPR No.XI / MPR /1998 dan undang-undang No. 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih KKN, maka telah dikembangkan dan ditetapkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan Negara melalui Inpres Nomor.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) sebagai Pertanggungjawaban atas Pelaksana tugas Pokok dan Fungsinya serta kewenangan Pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan.

Mengacu pada hal tersebut, maka Kabupaten Jayawijaya telah melakukan Job Deskripsi yang jelas dengan Pertanggungjawabnya. Masing-masing Job deskripsi tersebut dinilai dalam Lakip, mulai dari Staf dan Eselon IV bertanggungjawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada Eselon III bertanggungjawab pada Program, dan Eselon II Bertanggungjawab pada kebijakan Strategi pada SKPD/ Unit Kerja yang dipimpinnya serta Bupati Bertanggungjawab pada Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyelesaian tentang Realisasi Kegiatan dengan Rencana serta Keberhasilan dan Kegagalan dalam Pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dimulai dari Perencanaan strategi sampai pada pengukuran kinerja kegiatan yaitu kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Rencana Strategis dan Rencana Kinerja DPMK Tahun 2020.

Pengukuran Keberhasilan maupun Kegagalan capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya telah menggunakan Indikator Utama (IKU). IKU yang sering pula disebut Key Performance Indikator merupakan acuan untuk mengukur Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah dan SKPD dilingkungannya. Dalam ketentuan Umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. PER /09/M.PAN/5/2007 disebut kinerja

Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan / Sasaran DPMK Kab. Jayawijaya Tahun 2020, didukung dengan Dana Sebesar Rp. 6.635.773.721,00 (Enam Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), yang terbagi kedalam 2 (dua) Jenis belanja yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Alokasi Belanja Tidak Langsung Rp. 3,699.856.125,00 (Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah), (99%), Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 2.935.917.569,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), (96%). Dengan Realisasi Belanja Tidak Langsung Rp. 3,516.580.301,00 (Tiga milyar Enam Ratus Tujuh Juta Seratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah), Silpa Belanja Tidak Langsung Rp.2.059.912.420 (Dua Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah), (82%).

Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ini, diharapkan dapat memberikan Gambaran Kinerja yang dicapai Tahun 2020 dan dimanfaatkan sebagai Penjabaran Pelaksanaan Tupoksi di Tahun berikutnya.

Penyusunan LAKIP ini masih Banyak Kekurangan dan Kelemahan oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Wamena, - - 2021

Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Jayawijaya



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

a. *Gambaran Umum Organisasi /Gambaran Pelayanan Daerah*

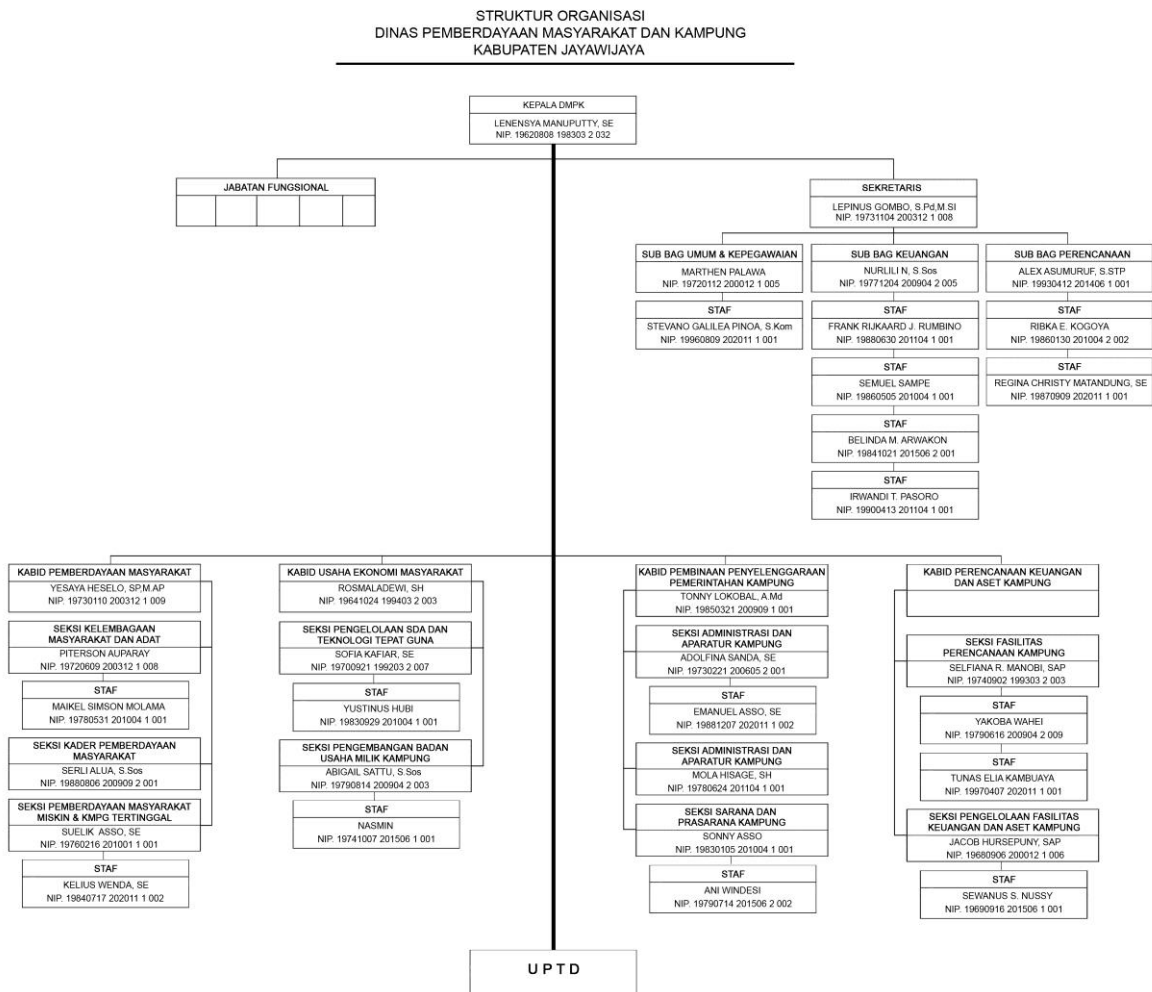
Mengacu pada Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 120 ayat 2 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Distrik dan Kampung/Kelurahan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya termasuk salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pemberdayaan masyarakat Kampung.

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. *Struktur Organisasi dan Tupoksi OPD*

1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPMK Kabupaten Jayawijaya



1.1 . Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jayawijaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Jayawijaya dan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jayawijaya meliputi: Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan kampung, Bidang Perencanaan Keuangan dan Aset Kampung dan Kelompok Fungsional.

Dalam mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya secara terukur dan berkelanjutan, maka tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris/ Sekretariat Dinas, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan Masyarakat, Lembaga Adat;
 - b. Seksi Pemberdayaan masyarakat
 - c. Seksi Pemberdayaan masyarakat miskin dan Kampung Tertinggal.
- d. Bidang Perencanaan keuangan dan Aset kampung, terdiri dari:
 - a. Seksi Fasilitasi Perencanaan Kampung;
 - b. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung.
 - c. Seksi Verifikasi & Evaluasi Perkembangan Kampung.
- e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Mikro Pedesaan;
 - b. Seksi Pengelolaan SDA & Teknologi Tepat Guna.
 - c. Seksi Pengembangan Usaha milik Kampung
- f. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, terdiri dari:
 - a. Seksi Bina Administrasi & Aparatur kampung;
 - b. Seksi Penataan Kampung;
 - c. Seksi Sarana & Prasarana Kampung.

1.2. Struktur Organisasi

Selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayawijaya dan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya, sebagaimana disajikan dalam Bagan

Tatalaksana organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Kabupaten Jayawijaya, dalam pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan mengacu pada standar pelayanan publik dan standar operasional baku (Standard Operational Procedure/ SOP) masing-masing bidang pelayanan. Standar Pelayanan Publik sebagai salah satu bentuk konkrit upaya-upaya peningkatan pelayanan publik yang disusun dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepa

Peningkatan pelayanan publik harus ditingkatkan melalui berbagai

1. pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tata laksana dan akuntabilitas. Diharapkan, hal ini dapat menghasilkan pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

- a. UPT Badan, membawahi:

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*LAKIP*) bertujuan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dalam rangka pencapaian Visi dan Misinya, Evaluasi terhadap kegagalan dan keberhasilan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya, dan

umpan balik dari hasil evaluasi bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya dalam menyusun rencana kerja berikutnya.

C. SISTEMATIKA PENULISAN LAKIP

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya, disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang Gambaran Umum, Tujuan LAKIP Tahun 2020, dan Sistematika LAKIP Tahun 2020.

BAB II. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Memuat tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya, dan Rencana Kinerja Tahunan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN JAYAWIJAYA

Menguraikan tentang Pengukuran Kinerja, Capaian dan Analisa Kinerja.

BAB IV. HAMBATAN DAN UPAYA PEMECAHAN

BAB V. PENUTUP

BAB II RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan, yaitu periode 2018 - 2023 dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis (*RENSTRA*) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana tersebut memerlukan integrasi kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya lain sehingga dapat membentuk dan membangun sebuah rencana yang dapat menjawab tantangan yang dihadapi dalam pembangunan, khususnya pemberdayaan masyarakat kampung.

Analisis terhadap lingkungan organisasi, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada disekitarnya. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan faktor penentu untuk mewujudkan visi dan misi, serta strategi yang diperlukan. Dengan kata lain, bahwa rencana strategis yang disusun setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan pelaku organisasi dalam pengambilan keputusan, dan menentukan langkah-langkah untuk pencapaian tujuan.

Rencana Strategis (*RENSTRA*) digunakan untuk menjawab pertanyaan berikut :

1. Dimana kita berada sekarang?., disini perlu analisis kemampuan dan kelemahan lingkungan internal dan eksternal.
2. Kemana kita akan menuju?., disini perlu menetapkan visi dan misi. dengan apa kita kesana?., disini perlu menetapkan tujuan dan sasaran.

3. Bagaimana cara kita kesana?., disini perlu menetapkan program dan kegiatan.
4. dan seterusnya.

Dari uraian tersebut, menunjukkan betapa pentingnya penyusunan sebuah rencana strategis bagi suatu organisasi. Karena rencana strategis selain mengandung harapan jangka panjang, juga mengandung tahapan program/ kegiatan yang jelas.

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN JAYAWIJAYA

Penyusunan Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, dimaksudkan untuk menjadi alat pengendali dan tolok ukur dalam pelaksanaan program/kegiatan selama 5 tahun, atau pelaksanaan kegiatan tahunan.

1. *Visi dan Misi*

a. *Visi*

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, bahwa visi pembangunan daerah adalah **“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”** dan misi pembangunan daerah yang terdiri atas (1) Meningkatkan taraf hidup masyarakat; (2) Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal, dan hukum; (3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); (4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; (5) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing; dan (6) Meningkatkan pembangunan berbasis Kampung dan kawasan Kampung. Berdasarkan 6 (enam) misi tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya menjabarkan arahan RPJMD dengan mendukung beberapa misi, antara lain:

- a. Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;

- b. Misi 3: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural secara Berkelanjutan

Dengan misi-misi tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya fokus pada:

1. Tujuan dari Misi 1 (kesatu) yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung, dengan sasaran:
 - (1) meningkatkan kesempatan kerja dan jiwa wirausaha masyarakat,
 - (2) meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur;
2. Tujuan dari Misi 3 (ketiga) yaitu mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, dengan sasaran:
 - (1) meningkatkan kualitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah,
 - (2) meningkatnya kualitas pelayanan publik

Faktor pendorong pelayanan OPD terhadap pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 sebagaimana pada Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, bahwa visi pembangunan daerah adalah **“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”** dan misi pembangunan daerah yang terdiri atas (1) Meningkatkan taraf hidup masyarakat; (2) Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal, dan hukum; (3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); (4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; (5) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing; dan (6) Meningkatkan pembangunan berbasis Kampung dan kawasan Kampung. Berdasarkan 6 (enam) misi tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya menjabarkan arahan RPJMD dengan mendukung beberapa misi, antara lain:

- a. Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Misi 3: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural secara Berkelanjutan

Dengan misi-misi tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya fokus pada:

- a) Tujuan dari Misi 1 (kesatu) yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung, dengan sasaran:
- (1) meningkatkan kesempatan kerja dan jiwa wirausaha masyarakat,
 - (2) meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur;
- b) Tujuan dari Misi 3 (ketiga) yaitu mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, dengan sasaran:
- (1) meningkatkan kualitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah,
 - (2) meningkatnya kualitas pelayanan public.

Faktor pendorong pelayanan OPD terhadap pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 sebagaimana pada Tabel 3.2

VISI : Terwujudnya masyarakat Jayawijaya yang sejahtera mandiri berkualitas dan berbudaya

MISI : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah kampung	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah kampung	Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan pemerintah kampung dan pengelolaan keuangan kampung	<p>Pelaksanaan pembinaan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada aparatur pemerintah kampung dalam hal manajemen pemerintahan dan keuangan kampung</p> <p>Merumuskan regulasi penyelenggaraan pemerintahan kampung</p>

VISI : Terwujudnya masyarakat Jayawijaya yang sejahtera mandiri berkualitas dan berbudaya

MISI : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural secara Berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menurunkan Presentase KK Miskin	Meningkatnya peran kapasitas lembaga masyarakat kampung dalam menurunkan angka kemiskinan	Peningkatan kinerja lembaga UEM, BUMKAM, TTG, KPMD, BMK, LMA, PKK dan lainnya	<p>Pelaksanaan pembinaan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan</p> <p>Melakukan inventarisir data potensi dan masalah</p> <p>Memfasilitasi atau mempermudah akses dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya</p>

Tabel 3.2

VISI : Terwujudnya masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera Mandiri, Berkualitas dan Berbudaya

MISI : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah kampung	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah kampung	Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan pemerintah kampung dan pengelolaan keuangan kampung	<p>Pelaksanaan pembinaan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada aparatur pemerintah kampung dalam hal manajemen pemerintahan dan keuangan kampung</p> <p>Merumuskan regulasi penyelenggaraan pemerintahan kampung</p>

VISI : Terwujudnya masyarakat Jayawijaya yang sejahtera mandiri berkualitas dan berbudaya

MISI : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural secara Berkelanjutan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menurunkan	Meningkatnya peran	Peningkatan kinerja	Pelaksanaan pembinaan

Presentase KK Miskin	kapasitas lembaga masyarakat kampung dalam menurunkan angka kemiskinan	lembaga UEM, BUMKAM, TTG, KPMD, BMK, LMA, PKK dan lainnya	dalam bentuk pelatihan dan pendampingan Melakukan inventarisir data potensi dan masalah Memfasilitasi atau mempermudah akses dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya
----------------------	--	---	--

b. Misi

Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Jayawijaya yang ditetapkan merupakan peran Strategis yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat DPMK Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023, didasarkan pada isu-isu Strategis Lingkup DPMK Kabupaten Jayawijaya untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang merupakan penjabaran dari Visi DPMK Kabupaten Jayawijaya yaitu menetapkan kebijaksanaan Daerah dan memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
2. Mengembangkan Kelembagaan dan Partisipasi Sosial Budaya serta Pemantapan Program Nasional Dana Desa;
3. Pengembangan dan Perluasan Akses Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan;
4. Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan;
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).

C. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DPMK KABUPATEN JAYAWIJAYA

Tujuan :

1. Meningkatnya efektifitas dan kualitas penyelenggaraan desa/kelurahan dan optimalnya pelayanan publik;
2. Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan partisipasi keswadayaan Gotong Royong Masyarakat dalam pembangunan;
3. Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Pemberdayaan Masyarakat;
4. Pemantapan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPMP);
5. Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat dan Penguatan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan;
6. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berwawasan Lingkungan berbasis kearifan lokal;
7. Meningkatnya kapasitas Aparatur yang profesional dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana yang memadai.

Sasaran :

1. Terselenggaranya Pemerintahan kampung/kelurahan yang tertib dan efektif agar pelayanan publik lebih optimal;
2. Berperannya lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan untuk menggerakkan partisipasi dan kegotong royongan masyarakat dalam proses pembangunan;
3. Terwujudnya kehidupan sosial budaya masyarakat dan pelestarian adat yang maju dan dinamis;
4. Optimalisasi pelaku dan penerima manfaat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dalam rangka menurunkan angka kemiskinan;

5. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keluarga melalui pengembangan usaha ekonomi yang produktif;
6. Terkelolanya potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi kelompok masyarakat;
7. Terbentuk kualitas aparatur yang profesional dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta terpenuhinya sarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) yang memadai.

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DPMK KABUPATEN JAYAWIJAYA

Sebagai penjabaran dan penerapan misi tersebut di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Jayawijaya menetapkan strategis dan kebijakan yang ingin dicapai dalam periode 2018 - 2023, sebagai berikut :

3.1. STRATEGI

Dalam upaya pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan beberapa strategi sebagai berikut :

1. Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan melalui Pembinaan Pengembangan Kapasitas, Pelatihan dan Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik;
2. Mengoptimalkan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam menggerakkan Partisipasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dalam Proses Pembangunan melalui pembinaan, pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pelaksanaan Bulan Bhakti dan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD);
3. Mewujudkan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat dan Pelestarian Adat isitiadat melalui penguatan Pokja Profil Desa/Kelurahan, Pokjanal

Posyandu melalui SIP, Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan, PKK, PMT-AS, Perlindungan, Penguatan, Penguatan Lembaga Adat;

4. Mengoptimalkan Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian PNPM serta mengoptimalkan Lembaga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah dalam rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Mengembangkan kelompok usaha ekonomi produktif melalui perluasan, UEIM.
6. Mengoptimalkan pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan mendayagunakan TTG berbasis kearifan lokal melalui Kampung Pelaksanaan Gelar TTG.
7. Mengutamakan peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur dalam menyelenggarakan Tupoksi dan Pemberdayaan Masyarakat melalui pemenuhan sarana kerja yang memadai serta Pendidikan dan Pelatihan.

3.2. KEBIJAKAN

Dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Jayawijaya menetapkan beberapa kebijakan pembangunan sebagai berikut :

1. Memfasilitasi dan melakukan pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik;
2. Meningkatkan Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam menggerakkan Partisipasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dalam pembangunan;

3. Memantapkan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat sesuai tradisi dan Adat Istiadat dalam mewujudkan keharmonisan dan ketertiban masyarakat;
4. Mendorong kemandirian masyarakat perdesaan melalui Dana Desa/Kampung sebagai wujud Penanggulangan Kemiskinan;
5. Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan keluarga, ketahanan pangan Masyarakat, memantapkan manajemen Lembaga Keuangan Mikro (LKM) perdesaan dan usaha-usaha desa serta Pengembangan Institusi Pasar/Pasar Desa;
6. Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang didukung sarana fasilitasi kerja memadai.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Pada tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya menetapkan target untuk masing-masing sasaran dan kegiatan yang harus dilaksanakan/dicapai. Target pencapaian dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Tahunan Tahun 2020 Target kinerja ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator tingkat sasaran maupun kegiatan. Indikator sasaran umumnya ditetapkan berdasarkan indikator *outcomes (hasil)*, sedangkan indikator kegiatan berdasarkan input, output, dan *outcomes* sebagaimana tertuang dalam **“Ikhtisar Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya”**, berikut ini :

Misi 1: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/ Kampung

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Target
<p>1.1. <i>Tujuan:</i> Meningkatkan Penyelenggaraan Kampung / Kelurahan</p> <p>1.2. <i>Sasaran:</i> Meningkatkan Pembinaan Pemerintah Kampung / Kelurahan.</p>	<p>Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Kawasan Pedesaan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Sosialisasi dan Fasilitasi pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Kampung; Pendamping Administrasi Proyek (PAP) Dana Kampung; Sosialisasi Pengelolaan Aset kampung; Bulan Bhakti Gotong-royong/Lomba Perkembangan Kampung</p>		

Misi 3: Pengembangan dan Perluasan Akses Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan.

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Target
<p>3.1. <i>Tujuan:</i> Meningkatkan pengembangan Perluasan Akses Usaha Ekonomi Perdesaan</p> <p>3.2. <i>Sasaran:</i> Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan</p>	<p>Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan; Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif.</p>		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN JAYAWIJAYA

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menilai sejauhmana capaian dari pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (*RKT*), dimana *RKT* merupakan jabaran rencana tahunan dari Rencana Strategis. Oleh karena itu setiap kegiatan yang dituangkan didalam *RKT* harus menunjukkan satuan yang dapat diukur. Pengukurannya dapat dilakukan secara bertingkat, dimana pengukuran pertama adalah menentukan apakah sasaran yang harus dicapai telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tidak. Kemudian pengukuran jenjang berikutnya adalah menentukan apakah sasaran yang telah dicapai mengarah pada tujuan sedangkan pencapaian tujuan baru dapat diukur setelah sejumlah sasaran tahunan telah dicapai.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa pengukuran kinerja dilakukan dengan menilai pencapaian indikator kinerja. Dengan demikian akan diketahui seberapa besar sasaran yang telah dicapai dari target yang ditetapkan dalam *RKT*. Oleh karena itu pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja pada sasaran-sasaran yang dicapai pada tahun bersangkutan. Untuk maksud ini perlu dikonversikan dengan satuan kinerja sasaran.

3.2 CAPAIAN DAN ANALISA KINERJA

a. Capaian Kinerja

Untuk mengetahui berapa besar capaian kinerja, perlu dilakukan evaluasi keseluruhan rencana kerja tahun bersangkutan. Dengan demikian dapat diketahui kondisi berikut :

1. Sebab-sebab tidak tercapainya target sasaran, misalnya hambatan dan permasalahan yang dihadapi;

2. Pertanggungjawaban penggunaan sumber daya yang dimiliki; dan
3. Efisiensi, efektifitas penggunaan sumber daya.

Untuk menunjukkan gambaran capaian kinerja, berikut ini dapat dikemukakan capaian kinerja sasaran Tahun 2020 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada 332 Kampung/Kelurahan Tahun 2020.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya Berdasarkan Penilaian Kinerja Sasaran (PKS) Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target (06)	Realisasi (05)	Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	Meningkatkan Pembinaan Pemerintah Kampung / Kelurahan.	1.1 Pendataan Kapasitas Sarana dan Prasarana Kampung;	%	99	86/4	100
		1.2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;	%	99	100/5	100
		1.3 Sosialisasi dan Fasilitasi pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Kampung;	%	99	100/5	100
		1.4 Pendamping Administrasi Proyek (PAP) Dana Kampung;	%	99	100/5	100
		1.5 Sosialisasi Pengelolaan Aset kampung;	%	99	100/5	100
02.	Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam membangun Kampung.	2.1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	%	99	100/5	100
		2.2 Pemberdayaan PKK	%	99	99/4	100
<hr/>						
No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target (06)	Realisasi (05)	Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
05.	SDM- DPMK	5.1. Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan OPD.	%	99	100/12	100

Analisa Kinerja

Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya menetapkan 7 sasaran yang dijabarkan dalam 14 indikator kinerja. Sasaran dan indikator yang tersebut nantinya menjadi instrument untuk mengukur atau menilai kinerja pada

Tahun 2020. Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya berdasarkan analisis sasaran dan indikator yang ada, memberikan gambaran sebagai berikut :

I. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan

a. Dana PAP Program Dana Desa, diukur dari seberapa besar dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya, kemudian diserahkan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya untuk ditindaklanjuti berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran. Hal ini sangat bermanfaat guna meningkatkan pelayanan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat dalam pembangunan kampung-kampung di Kabupaten Jayawijaya. Dari capaian kinerja tahun 2020 menunjukkan bahwa target yang ditetapkan ialah 99% pendampingan Dana desa terealisasi sebesar 100% pada 40 Distrik.

b. Meningkatnya Kualitas Aparat Distrik / Kampung Untuk mendukung Program program yang ada ditingkat Distrik maupun Desa/ Kampung karena tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya pembangunan bagi masyarakat. Keadaan tersebut disebabkan oleh beban kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya yang cukup berat karena pelimpahan sebagian kewenangan substansi yaitu pelaksanaan maupun kewenangan operasional yaitu pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan tenaga pendamping, pengelolaan peralatan maupun pengelolaan keuangan yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Ditengah beban yang berat, dukungan biaya pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya prosentasinya belum memenuhi sesuai dengan amanat UU NO 21 tahun 2001 tentang OTSUS.

Pada sisi yang lain daya beli masyarakat kita yang terbatas karena 62,70 % miskin, jangkauan transportasi yang sulit dan mahal lalu belum ada tanda-tanda pemulihan makro ekonomi karena inflasi tinggi dan investasi rendah sehingga tidak berpeluang untuk menciptakan lapangan kerja yang mendatangkan pendapatan bagi rakyat. Karena itu perlu ada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang lebih ditingkatkan guna penuntasan kemiskinan dan kualitas hidup serta kesejahteraan sosial-ekonomi yang terjadi pada masyarakat khususnya di kampung-kampung daerah pegunungan.

- c. Meningkatnya pengetahuan bagi Aparat Desa/ Kelurahan untuk Menyusun /Membuat Profil Kampung rata-rata belum mempunyai data data pemberdayaan Kampung terutama pada kampung-kampung pemekaran.
- d. Meningkatnya ilmu pengetahuan bagi aparat desa / kelurahan untuk menyusun /membuat Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa / Kampung mengingat kegiatan pelatihan ini sangat penting , maka Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) akan menganggarkan setiap tahun agar seluruh Kepala Desa dan Sekretaris Desa mengikuti Pelatihan Penyusunan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa / Kampung ini dengan Baik.

II. Meningkatkan Pengembangan Kelembagaan dan partisipasi Sosial

Budaya.

1. Meningkatkan Pemberdayaan lembaga dan organisasi Masyarakat Pedesaan, menunjukkan bahwa kinerja pemerataan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya tahun 2020, diukur dengan berapa besar keberadaan dana dan jumlah kampung yang telah mengikuti Pelatihan Lembaga Masyarakat Adat. Hal ini untuk mengetahui

peningkatan Pemahaman tentang fungsi dan Tugas lembaga - lembaga yang ada di Desa/ Kampung dari kondisi ini, maka kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya untuk mengadakan pelatihan pemberdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat perdesaan 99% telah realisasi 100% atau pencapaian kinerja 100% untuk 3 Distrik yang terdiri dari 40 orang dari kampung/kelurahan tersebut.

2. Pendamping Penyaluran Bantuan Desa menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya tahun 2020, semakin besar peranannya dalam membangun kampung baik dari bertambahnya jumlah kampung maupun bertambahnya dana pembangunan kampung, maka kiranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk pendamping Penyaluran Bantuan Desa yang ditargetkan 99% telah terealisasi atau pencapaian kiranya 100% untuk kegiatan pada 328 Kampung.

III. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana Kampung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK)

A. SARANA PENUNJANG

1. Organisasi

Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya, terdiri atas:

- a. *Kepala Dinas*, mempunyai tugas pokok adalah memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan DPMK dalam membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
- b. *Sekretariat*, yang membawahi 3 (*tiga*) Sub Bagian antara lain:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

- 2) Sub Bagian Keuangan, dan
- 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

Sekretariat mempunyai tugas pokok adalah memberikan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan DPMK.

c. *Bidang Perekonomian Kampung*, membawahi 3 (*Tiga*) Sub Bidang antara lain:

- 1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Mikro Pedesaan, dan
- 2) Sub Bidang Penerapan Teknologi Tepat Guna.
- 3) Seksi Pengembangan Usaha milik Kampung

Bidang Perekonomian Kampung mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan teknis usaha ekonomi kampung dan penerapan teknologi tepat guna.

d. *Bidang Pemberdayaan Masyarakat*, membawahi 3 (*Tiga*) Sub Bidang antara lain:

- 1) Sub Seksi Kelembagaan Masyarakat, Lembaga Adat
- 2) Seksi Pemberdayaan masyarakat
- 3) Seksi Pemberdayaan masyarakat miskin dan Kampung.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat dan adat serta peningkatan kesejahteraan keluarga.

e. *Bidang Perencanaan keuangan dan Aset kampung*, membawahi 3 (*Tiga*) Sub Bidang antara lain:

- 1) Seksi Fasilitasi Perencanaan Kampung, dan
- 2) Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung.
- 3) Seksi Verifikasi & Evaluasi Perkembangan Kampung.

Bidang Pembangunan Kampung mempunyai tugas pokok adalah melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan sarana dan prasarana kampung serta pengembangan kampung.

2. Kepegawaian

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya merupakan organisasi dengan lingkup dan jangkauan yang cukup luas. Dengan demikian jumlah pegawai yang tersedia harus sesuai dengan kebutuhannya.

3. Keuangan

Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa alokasi dana untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 5.251.394.634,00 terdiri dari: belanja tidak langsung Rp. 3,699.856.125,00 dan belanja langsung 2.935.917.596,00 Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Publik Tahun 2020
Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Jayawijaya

No	Program/Kegiatan	Alokasi (Rp.,)	Sumber Dana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B. Belanja Publik				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.161.625.200		
1.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 72.225.600	DAU	
1.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Rp. 4.040.000	DAU	Tidak dilaksanakan
1.3.	Penyediaan ATK	Rp. 54.182.000	DAU	
1.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 40.000.000	DAU	
1.5.	Penyediaan Makan dan Minum	Rp. 40.000.000	DAU	
1.6.	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar daerah	Rp. 259.900.000	DAU	
1.7.	Sosialisasi/Penyuluhan/Survei Lapangan/monitoring dalam daerah	Rp. 100.000.000	DAU	Tidak dilaksanakan
1.8.	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan kantor	Rp. 10.000.000	DAU	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 96.754.000		
2.1.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 50.000.000	DAU	Tidak dilaksanakan
2.2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 41.354.000	DAU	
2.3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp. 5.400.000	DAU	
3.	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 10.000.000		
3.1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja OPD	Rp. 10.000.000	DAU	

4.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung	Rp. 568.518.996		
4.1.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Rp. 100.000.000	DBH	
4.2.	Pelatihan Penguatan Kader Pangan dan Gizi	Rp. 468.518.996	OTSUS	
5.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp. 999.997.000		
5.1.	Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Wilayah Kampung	Rp. 249.997.000	DAU	
5.2.	Pendataan Kapasitas Sarana dan Prasarana Kampung	Rp. 250.000.000	DOK	
5.3.	Fasilitasi Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung	Rp. 300.000.000	DBH	
5.4.	Pendamping Administrasi Proyek (PAP) Dana Kampung dan Satgas Siskeudes	Rp. 200.000.000	DBH	
6.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp. 180.000.000		
6.1.	Pagelaran TTG (Teknologi Tepat Guna)	Rp. 180.000.000	OTSUS	
7.	Program Peningkatan Peran Perempuan di pedesaan	Rp. 150.000.000		
7.1.	Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Rp. 150.000.000	OTSUS	
8.	Program Partisipasi Masyarakat dalam Membanguan Desa	Rp. 350.000.000		
8.1.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp. 200.000.000	PAD	
8.2.	Pemberdayaan PKK	Rp. 150.000.000	OTSUS	
	Jumlah	Rp. 2.315.040.600		

Tabel 3.3
Rekapitulasi
Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Aparatur Tahun 2020 Pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Jayawijaya

No.	Uraian	Alokasi (Rp.,)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pendapatan		
2.	Belanja	6.635.773.721,00	DAU
2.1.	Belanja Tidak Langsung	3.699.856.125,00	DAU
2.1.1.	Belanja Pegawai	3.699.856.125,00	DAU
2.2.	Belanja Langsung	2.935.917.569,00	DAU/DBH/OTSUS
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,679,903,996,00	DAU/DBH
2.2.3.	Belanja Modal	82,458,000,00	DAU
	Belanja Pegawai	173.555.600,00	DAU
	Surplus/ (Defisit)	(6.635.773.721,00)	
	Pembiayaan Netto	0,00	

BAB IV HAMBATAN DAN UPAYA PEMECAHAN

Seiring dengan pelaksanaan Rencana Strategis (*RENSTRA*) yang dilakukan secara bertahap melalui Rencana Kinerja Tahunan (*RKT*) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya, maka selama dalam pelaksanaannya terdapat hambatan dan kendala, yakni sebagai berikut :

NO	HAMBATAN	UPAYA PEMECAHAN
1.	Rendahnya partisipasi masyarakat untuk mendukung program/kegiatan yang dilaksanakan	Memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan Kampung pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi/ penyuluhan/pembinaan/ pelatihan.
2.	Keterlambatan pencairan dana terutama dana OTSUS yang diarahkan, sehingga sebagian kegiatan dilaksanakan dalam waktu yang demikian sempit.	Mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak Provinsi Papua.
3.	Rendahnya kehadiran pendamping di tempat tugas.	Memberikan teguran dan peringatan tetapi juga diberikan dukungan rumah, insentif dan transport.
4.	Lemahnya kinerja pengelola kegiatan sehingga banyak kegiatan yang tertunda dari jadwal yang ditetapkan.	Memberikan teguran dan peringatan tapi juga dukungan terhadap persoalan yang dihadapi.
5.	Lemahnya kemampuan aparat dalam menguasai sasaran dan tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan.	Dilakukan rapat teknis untuk menyatukan pemahaman dan pemikiran dan diberi latihan dalam jabatan.

BAB V PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020 adalah sebuah pertanggungjawaban instansi kepada Bupati melalui Sekda dan Masyarakat (*public*) khususnya dalam mengemban misi Bupati Kabupaten Jayawijaya. Laporan akuntabilitas ini dibuat untuk mengukur sejauhmana keberhasilan instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan bagi masyarakat. Disamping itu juga menjadi ukuran untuk melakukan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan dana yang dialokasikan. Dengan demikian akan muncul pertanyaan apakah sudah efisien antara investasi dengan hasil yang dicapai . LAKIP ini pula menjadi sebuah instrument bagi masyarakat (*public*) untuk melihat dan mengetahui apa saja yang telah dilakukan instansi pemerintah terhadap masyarakat .

Kita menyadari, bahwa pembangunan pendidikan khususnya, dan pembangunan sumber daya manusia umumnya, adalah sebuah proses jangka panjang. Itu berarti apa yang dilakukan hari ini hasilnya akan terlihat pada 5, 10, sampai 15 tahun yang akan datang. Namun demikian pembangunan pemberdayaan masyarakat secara fisik sama halnya dengan pembangunan sektor/bidang lainnya, dimana hasil yang dicapai harus nampak dan merubah kondisi dalam jangka waktu pendek.

Kesimpulan berdasarkan uraian dalam LAKIP ini adalah, bahwa seluruh rangkaian kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, meskipun hasil yang dicapai belum sempurna harapan masyarakat.

Wamena, - - 2021

Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Jayawijaya



Lampiran 1.

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2018 - 2023**

INSTANSI : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya
VISI : Terwujudnya Kemampuan dan Kemandirian Masyarakat Untuk Berkembang Menuju Masyarakat Yang Maju
MISI 1 : Meningkatkan Peyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan

Tujuan (1)	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket. (6)
	Uraian (2)	Indikator (3)	Kebijakan (4)	Program (5)	
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah kampung	Terselenggaranya Pemerintahan Kampung/ Kelurahan yang Tertib dan Efektif.	Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan pemerintah kampung dan pengelolaan keuangan kampung	<p>Pelaksanaan pembinaan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada aparatur pemerintah kampung dalam hal manajemen pemerintahan dan keuangan kampung</p> <p>Merumuskan regulasi penyelenggaraan pemerintahan kampung.</p>	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintahan desa ;	

VISI : Terwujudnya masyarakat Jayawijaya yang sejahtera mandiri berkualitas dan berbudaya

MISI: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural secara Berkelanjutan

Tujuan (1)	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket. (6)
	Uraian (2)	Indikator (3)	Kebijaksanaan (4)	Program (5)	
2. Menurunkan Presentase KK Miskin	Meningkatnya peran kapasitas lembaga masyarakat dalam menurunkan angka kemiskinan	Peningkatan kinerja lembaga UEM, BUMKAM, TTG, KPMD, BMK, LMA, PKK dan lainnya	<p>Pelaksanaan pembinaan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan</p> <p>Melakukan inventarisir data potensi dan masalah</p> <p>Memfasilitasi atau mempermudah akses dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya</p>	<p>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;</p> <p>Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Pedesaan</p> <p>Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Thknis dan Masyarakat Dana Pendamping</p> <p>Penyaluran Bantuan Desa</p> <p>PAP Dana Desa</p> <p>Penyelenggaraan Pendekatan Aksi Partisipatif PPD</p> <p>Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Desa</p> <p>Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan tentang Teknologi Tepat Guna</p>	

Lampiran 2.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2020**

INSTANSI : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya

No (1)	Sasaran (2)	Program (3)	Kegiatan (4)	Indikator Kinerja (5)	Satuan (6)	Target (Rp.,) (7)
1.	Tercapainya kinerja aparat dalam pelayanan administrasi perkan-toran terhadap pember-dayaan masyarakat Kampung.	1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkan-toran.	1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana Tenaga Waktu Output : Jumlah yang di bayar Outcomes : Sarana penunjang	Rp. Orang Bulan Unit Paket Kegiatan	5.000.000.00 - - - 1 -
			1.2. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana Tenaga Waktu Output : Jumlah yang di beli Outcomes : Tersedia inventarisasi penggunaan administrasi	Rp. Orang Bulan Unit Paket Kegiatan	22.200.000.00 - - 12 - -
			1.3. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Input : Dana Tenaga Waktu Output : Jumlah barang Outcomes : Peningkatan barang	Rp. Orang Bulan Unit Paket Kegiatan	4.000.000.00 - - 1 - -
			1.4. Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana Tenaga Waktu Output : Tersedianya makanan dan minuman Outcomes : Efektifitas meningkat efektivitas kerja	Rp. Orang Bulan Unit Paket Kegiatan	20.000.000.00 - - - 1 -

Lanjutan.						
No.	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target (Rp.,)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1.5. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Input : Dana Tenaga Waktu Output : Jumlah Rapat dan Konsultasi Outcomes : Peningkatan Koordinasi	Rp. Orang Bulan Unit Paket Kegiatan	207.000.000.00 8 - - - -
			1.6. Penyediaan Jasa Surat menyurat	Input : Dana Tenaga Waktu Output : Tersedianya pembinaan Outcomes : Peningkatan pembinaan pada masyarakat Kampung	Rp. Orang Bulan Unit Paket Kegiatan	4.800.000.00 2 - - - -
No	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Tercapainya Pelaporan Kinerja dan Pelaporan	2.1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.1 Penyusunan laporan Capaian Kinerja DAN Iktisar Realisasi OPD	Input : Dana Tenaga waktu Output : terlaksananya pemenuhan administrasi kantor Outcomes : terjadi peningkatan sarana gedung kantor	Rp. Orang Bulan Unit Paket Kegiatan	20.000.000.00 - - 1 - -

No (1)	Sasaran (2)	Program (3)	Kegiatan (4)	Indikator Kinerja (5)	Satuan (6)	Target (7)
3.	Tercapainya keberdayaan masyarakat Kampung	3.1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung	3.1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Input : Dana Tenaga waktu Output : Bertaksananya penyerahan dana Outcomes : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat	Rp. Orang Bulan Unit Paket Kegiatan	300.000.000,00 - - - - -
			3.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan tenaga Teknis dan Masyarakat	Input : Dana Tenaga waktu Output : Bertaksananya penyerahan dana Outcomes : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat	Rp. Orang Bulan Unit Paket Kegiatan	200.000.000,00 - - - - -
			3.3 Dana Pendamping Penyaluran Bantuan Desa	Input : Dana Tenaga waktu Output : Bertaksananya penyerahan dana Outcomes : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat	Rp. Orang Bulan Unit Paket Kegiatan	100.000.000,00 - - - - -
			3.4 Dana PAP PNPM Mandiri Respek	Input : Dana Tenaga waktu Output : Bertaksananya penyerahan dana Outcomes : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat	Rp. Orang Bulan Unit Paket Kegiatan	1.000.000.000,00 - - - - -

No (1)	Sasaran (2)	Program (3)	Kegiatan (4)	Indikator Kinerja (5)	Satuan (6)	Target (7)
4.	Tercapainya keberdayaan masyarakat Kampung	3.1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung	4.1 Penyelenggaraan Pendidikan Aksi Partisipatif PPD	Input : Dana Tenaga waktu Output : Bertindakannya penyerahan dana Outcomes : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat	Rp. Orang Bulan Unit Paket Kegiatan	150.000.000,00 - - - - -
			4.2 Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Desa	Input : Dana Tenaga waktu Output : Bertindakannya penyerahan dana Outcomes : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat	Rp. Orang Bulan Unit Paket Kegiatan	300.000.000,00 - - - - -
			4.3 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tentang Teknologi Tepat Guna	Input : Dana Tenaga Waktu Output : Bertindakannya penyerahan dana Outcomes : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat	Rp. Orang Bulan Unit Paket Kegiatan	250.000.000,00 - - - - -
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Tercapainya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kampung	4.1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kampung	5.1 Pemberdayaan PKK	Input : Dana Tenaga waktu Output : Jumlah kampung yang terdata Outcomes : Peningkatan potensi kampung	Rp. Orang Bulan Unit Paket Kegiatan	200.000.000,00 - - - - -
			5.2. Bulan Bhakti Gotong Royong/ lomba desa	Input : Dana Tenaga Waktu Output : Jumlah peserta yang mengikuti lomba Outcomes : Kualitas perlombaan lebih baik	Rp. Orang Bulan Unit Paket Kegiatan	200.000.000,00 10 - - - -

6	Tercapainya Kapasitas Aparatur Desa	5.1 Program Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	6.1. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Profil Desa / Kampung	Input : Dana Tenaga Waktu Output : Jumlah peserta yang dilatih Outcomes : Peningkatan pemahaman usaha ekonomi	Rp. Orang Bulan Unit Paket Kegiatan	250.000.000.00 40 - - - -
			6.2 Pelatihan Aparatur Desa Dalam Penyusunan RPJM Desa / Kampung	Input : Dana Tenaga Waktu Output : Kegiatan dan program yang di lakukan Outcomes : Terwujudnya kegiatan TNI masuk Kampung	Rp. Orang Bulan Unit Paket Kegiatan	300.000.000.00 - - - - -
7	Tercapainya Peran Perempuan di Perdesaan	6.1 Program Peningkatan Perempuan di Perdesaan	7.1 Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Input : Dana Tenaga Waktu Output : Kegiatan dan program yang di lakukan Outcomes : Terwujudnya kegiatan TNI masuk Kampung	Rp. Orang Bulan Unit Paket Kegiatan	200.000.000.00 - - - - -

Wamena, - - 2021

Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Jayawijaya



